

ABSTRAK

Twitter adalah sebuah media aplikasi atau tempat dan wadah dapat diaksesnya berbagai macam tulisan atau tweet dari seseorang yang memiliki akun Twitter. Isi tulisan tersebut berupa informasi, kejadian yang baru saja terjadi, hiburan, dan bisa digunakan sebagai media jual beli online serta wadah untuk mempromosikan berbagai macam kepentingan termasuk kegiatan prostitusi. Banyak akun di Twitter menyediakan jasa prostitusi lengkap beserta harga, foto, nomor yang bisa dihubungi. Pemilik akun tersebut sudah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat (2). Dalam kedua Undang - Undang tersebut sama - sama menjerat seseorang maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana sehingga pemilik akun Twitter yang menyediakan jasa prostitusi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pemilik akun tersebut juga sudah melakukan kesalahan berupa kesengajaan dengan metode kegiatan prostitusi dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa adanya batasan umur serta tidak harus pemilik akun aktif di Twitter yang dapat mengakses. Twitter juga tidak melakukan upaya kontrol dan filterisasi terhadap setiap konten atau tulisan yang di muat oleh pemilik akun di Twitturnya.

Kata Kunci: *Tindak pidana, prostitusi, dan media online.*

ABSTRACT

Village Consultative Body (BPD) as a legislative body at the village level as a representative of the community who has full authority to implement democratic culture at the village level, both in terms of supervision of the Village Government and in terms of accommodating the aspirations of the Village Community. BPD is expected to be a political forum for villagers to convey ideas or invite them to be realized in the development and policies in the village. This can be realized with the approval of the BPD as a legislative body in the village, playing an active role in terms of carrying out its duties and functions. The purpose of this study is the Need for Women in the appointed seats in the Village Consultative Body membership in community assistance. in this research is descriptive research. Data analysis in qualitative research Based on the use of research and development in interpreting data about variables, is non-quantitative. Research shows that the collection of BPD in the field of community aspirations covers the rights of citizens in filling BPD members under their rights. The rights of villagers in the election of BPD members are supported by the 1945 Constitution Article 28E paragraph (3) issued an opinion "in essence, each person whose rights are agreed to be safeguarded and supported by law, including matters in electing and being elected in all fields of government regardless of differences in each of the broadest or most complete aspects of village governance.

Keywords: **Village Consultative Body, community aspirations, women's representation, women's politics, gender equality**